

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 194/PMK.02/2011  
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN  
PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK  
(MULTI YEARS CONTRACT) DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : .....

Kode dan Nama Output : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....  
Kode dan Nama Program : .....  
Kode dan Nama Satuan Kerja : .....

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. pekerjaan yang direncanakan dengan Kontrak Tahun Jamak tersebut telah memenuhi kelayakan teknis; dan
2. ketersediaan dana bagi pelaksanaan Kontrak Tahun Jamak bukan merupakan tambahan pagu (*on top*).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP. ....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : .....

Kode dan Nama Output : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....  
Kode dan Nama Program : .....  
Kode dan Nama Satuan Kerja : .....

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. sisa dana yang tidak terserap dalam suatu tahun anggaran dalam periode Kontrak Tahun Jamak, tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama;
2. pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.\*)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP. ....

\*) dicoret apabila bukan berupa pekerjaan pembangunan infrastruktur



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : .....

Kode dan Nama Output : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....  
Kode dan Nama Program : .....  
Kode dan Nama Satuan Kerja : .....

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini,

Pengguna Anggaran Kementerian Negara/Lembaga  
....., dengan ini menyatakan bahwa:

- a. akan menyelesaikan pengadaan/pembebasan lahan/tanah secara simultan dengan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam periode Kontrak Tahun Jamak;
- b. akan menjaga pelaksanaan kegiatan sesuai rencana; dan
- c. segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh keterlambatan penyelesaian pengadaan/pembebasan lahan/tanah tidak dapat dibebankan pada APBN, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Pengguna Anggaran

.....

NIP/NRP. ....

LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 194/PMK.02/2011  
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN  
PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK  
(MULTI YEARS CONTRACT) DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : .....

Kode dan Nama Output : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....  
Kode dan Nama Program : .....  
Kode dan Nama Satuan Kerja : .....  
Kementerian Negara/Lembaga : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ....., menyatakan bahwa usul perubahan komposisi pendanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas dilakukan karena .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP. ....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : .....

Kode dan Nama Output : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....  
Kode dan Nama Program : .....  
Kode dan Nama Satuan Kerja : .....  
Kementerian Negara/Lembaga : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ....., menyatakan bahwa persetujuan Kontrak Tahun Jamak yang diusulkan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas adalah dalam rangka menjaga kesinambungan kualitas/efisiensi/efektifitas/menjaga kesatuan proses dan akuntabilitas pelaksanaan pekerjaan\*), dengan alasan:  
.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....

NIP/NRP. ....

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

NOMOR : .....

Kode dan Nama Output : .....  
Kode dan Nama Kegiatan : .....  
Kode dan Nama Program : .....  
Kode dan Nama Satuan Kerja : .....  
Kementerian Negara/Lembaga : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ....., menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Kontrak Tahun Jamak yang tercakup dalam kode dan nomenklatur tersebut di atas yang diusulkan untuk mendapatkan persetujuan Kontrak Tahun Jamak merupakan kebijakan prioritas pemerintah yang pelaksanaannya tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran, karena .....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

.....  
NIP/NRP. ....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 194/PMK.02/2011  
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN  
PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK  
(MULTI YEARS CONTRACT) DALAM  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kementerian/Lembaga	Program	Kegiatan	Pekerjaan yang Dikontrakkan	Realisasi	
				Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

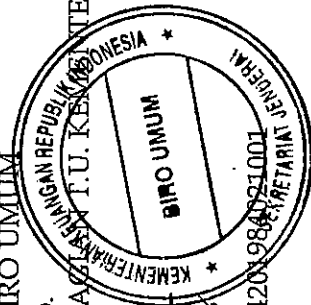
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BANGUNAN T.U. KEMENTERIAN



GIARTO B

NIP. 19590420198021001